

**PENGARUH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN (CIVIC
COMPETENCES) TERHADAP KEHIDUPAN DEMOKRASI SISWA KELAS IX
SMPN 1 BUNGKAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

Agus Susanto

(Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

ABSTRACT

Almost citizen don't understand about the meaning of democracy as rule and law. They understand and assume the democracy is a freedom. The students as citizen necessary given good understanding and capacity for the actualy democracy in citizen area. By Civic Education, it can solve problem, now days. Civic Education that concludes of the Civic Competences is not only discussing knowledge but also it emphasizes of the citizen's characters especially for students in Indonesia. The purposes of the research were to describe and analyze the influences of Civic Education as the developing of Civic Competences at the ninth grade students of SMP N 1 Bungkal.

In this research, the researcher used quantitative approach by using analytic descriptive method with survey technic and was operated by differetial statistics. The population of this research were the students at the ninth grade of SMP Negeri 1 Bungkal in Academic Year 2013/2014 that the total were 186 students. The research sampling consisted of 70 students that took with random sampling technic. Data analyse used multiple linier regression analyse, test T, test F, and determinate coefisient (R Square) and used program IBM SPSS Statistics 22 for Windows Release.

The result of data got from the result of the T test and every variable got T_o variable $X_1 = 2,511$, $X_2 = 2,782$, and $X_3 = 2,687 > T_t = 1,996$. It meant that every components of civic competence influences the students' democracy, significantly. The result of test F was gotten from $F_o > F_t (10,180 > 2,74)$. It meant that components of civic competence influences overwhelm the student's democracy, significantly. While for R Square value produce 0,316 or 31,6%. The conclusion of this research are ; First, every components of civic competence influences the student's democracy, significantly. Second, components of civic competence influences overwhelm of 31,6% toward student's democracy, and the rest is influenced by other factors unresearch. Third, civic competence influence the student's democracy, dominantly.

Key Words: Civic Education, Civic Competences, Democracy Life.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu negara yang kehidupannya ditentukan oleh rakyat. Menurut Rawitch (dalam Prasetyo, 2012:105), secara umum demokrasi diartikan pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil mereka yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa belum sesuainya konsep dengan apa yang

seharusnya dijalankan dalam sebuah negara demokrasi. Pandangan yang mencuat tentang pemerintah yang tidak demokratis memberikan bukti bahwa iklim demokrasi belum mampu tercipta dengan baik di negeri ini. Gerakan reformasi yang pada awalnya bertujuan untuk menata kembali negeri ini dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama dan Orde Baru seakan telah disalahartikan hingga hakekat dari gerakannya tidak sesuai lagi dengan makna reformasi itu sendiri. Ketidakmengertian akan makna demo-

krasi sebagai tatanan ketertiban, taat aturan dan hukum masih banyak dipahami oleh sebagian masyarakat dengan kebebasan bertindak anarkis dan main hakim sendiri. Dengan kata lain, demokrasi masih dimaknai dengan tindakan-tindakan yang jelas-jelas berlawanan dengan demokrasi.

Siswa merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan generasi penerus bangsa. Dewasa ini banyak ditemukan peristiwa-peristiwa yang tidak mencerminkan perilaku hidup demokratis dikalangan remaja khususnya pelajar antara lain banyaknya fenomena tawuran antar pelajar yang masih marak terjadi di berbagai kota di Indonesia. Hal tersebut tentu sangat disayangkan dan mengindikasikan bahwa pemahaman dan kemampuan pemuda dalam mengaktualisasikan demokrasi masih sangat lemah.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara perlu diberikan pemahaman dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara dengan mengenalkan, mensosialisasikan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana, sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik khususnya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam hal ini sekolah, berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wijaya dan Rusyan (dalam Kurniadi, 2010:1), sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai tanggungjawab untuk terus mendidik siswanya. Sekolah menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan merealisasikan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian semakin jelas bahwa sekolah merupakan sarana transformasi nilai-nilai kehidupan

dan kompetensi-kompetensi (*kognitif, afektif dan psikomotorik*) yang dibutuhkan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semua itu perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut, mata pelajaran yang berperan penting dalam menumbuhkan sikap demokratis siswa adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), karena mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis atau lebih dikenal dengan masyarakat madani (*civil society*). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi mewujudkan masyarakat demokratis, sedangkan misinya adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*), yaitu menciptakan kompetensi siswa agar mampu berperan aktif dan bertanggungjawab bagi kelangsungan pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan, karakter dan keterampilan kewarganegaraan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuhkan sikap demokratis siswa yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan demokrasi, baik di lingkungan kelas / sekolah maupun masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa komponen kompetensi kewarganegaraan yang hendak dikembangkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah komponen *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), komponen *civic skills* (kecakapan berpikir kritis, rasional, kreatif dan kecakapan berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam kehidupan ber-

masyarakat, berbangsa, dan bernegara), *civic disposition* (berkembang demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia, dan berinteraksi dengan bangsa lain di era globalisasi). Yang pada akhirnya siswa mampu merefleksikan ketiga komponen tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rumusan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*) secara parsial terhadap kehidupan demokrasi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal Tahun Pelajaran 2013/2014?
2. Bagaimanakah pengaruh pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*) secara simultan terhadap kehidupan demokrasi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal Tahun Pelajaran 2013/2014?
3. Apakah diantara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*) berpengaruh dominan terhadap kehidupan demokrasi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal Tahun Pelajaran 2013/2014?

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan terhadap kehidupan demokrasi siswa.

Penelitian ini berusaha mengeksplorasi dan mengelaborasi pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara

keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat dimensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam upaya memberikan pemahaman yang benar tentang kehidupan demokrasi. Sedangkan secara empirik (praktis) penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada semua pihak tentang makna demokrasi yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya iklim demokrasi dapat tercipta dengan baik dikalangan warga negara sehingga mampu mendorong pembangunan di negeri ini menjadi lebih maju dan beradap.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Secara bahasa, istilah "*Civic Education*" oleh sebagian pakar diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah "Pendidikan Kewargaan" diwakili oleh Azyumardi Azra dan Tim ICCE (*Indonesian Center for Civic Education*) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, sebagai pengembang *Civic Education* di Perguruan Tinggi yang pertama. Sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Zamroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin S. Winataputra dan Tim ICCE (*Indonesian Center for Civic Education*), Merphin Panjaitan, Soedijarto dan pakar lainnya (Tim ICCE UIN Jakarta, 2005:6).

Pendidikan Kewargaan pada satu sisi identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun di sisi lain, Pendidikan Kewargaan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga mem-

bangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia (*global society*).

David Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007:4) dalam kajian internasionalnya yang dilakukan bersama *School Curriculum and Assessment Authority (SCAA)* melalui "*National Foundation for Education Research in England and Wales (NFER)*" mengemukakan bahwa *Citizenship Education or civics education* didefinisikan sebagai berikut:

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Sedangkan secara khusus, peran pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Rumusan lain, seperti dikemukakan oleh Civitas Internasional, bahwa *Civic Education* adalah pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lambang-lambangannya, pemahaman tentang *rule of law*, hak asasi manusia, penguatan keterampilan partisipatif yang demokratis, pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian.

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) di Indonesia merupakan mata pelajaran wajib pada semua jenjang persekolahan yang bertugas bagaimana membentuk warga negara yang baik (*how a good citizen*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sehingga dengan kesadaran akan hak dan kewajibannya tersebut seorang warga negara diharapkan menjadi kritis, partisipatif dan bertanggungjawab.

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu "berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab" dan pelaksanaan fungsi pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003).

Secara khusus, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003). Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen-diknas) Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam paradigma baru, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value based education*" dengan kerangka sistemik sebagaimana dikemukakan Budimansyah (2008 dalam Kurniadi, 2010:35) Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggungjawab. Secara teoritik memuat dimensi-dimensi

kognitif, afektif dan psikomotorik (*Civic Knowledge, Civic Skill, Civic Dispositions*) yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara. Secara programatik menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding value*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan berwarga negara, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru juga mengusung tujuan utama untuk mengembangkan "*civic competences*" yakni *civic knowledge* (pengetahuan dan wawasan warga negara), *civic dispositions* (nilai, komitmen dan sikap kewarganegaraan) dan *civic skill* (perangkat keterampilan intelektual, sosial dan personal kewarganegaraan) yang seyogyanya di kuasai oleh setiap individu warga negara (Winataputra dalam Kurniadi, 2010:8).

Selain sebagai *value based education*, dalam era global Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi (*civic education for democracy*). Sekaitan dengan hal tersebut, Winataputra (2004) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan yang sangat strategis dalam mempersiapkan dan membina warganegara yang demokratis dan berkualitas. Siswa dipersiapkan serta dibina agar menjadi masyarakat atau warga negara yang demokratis yang cakap, terampil, bermoral dan bertanggungjawab serta mampu membangun kembali bangsa Indonesia.

2. Kompetensi Kewarganegaraan

Kompetensi kewarganegaraan adalah kemampuan yang harus dikuasai seorang peserta didik yang meliputi

pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan siswa yang mendukungnya menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana ditegaskan dalam Permen-diknas No. 22 tahun 2006, kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Branson (1999:8-9) menegaskan tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional. *The National Standards for Civics and Government (Center for Civic Education, 1994)* merumuskan komponen-komponen utama *civic competences* yang merupakan tujuan *civic education* meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

a. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Berdasarkan *National Standards and Civics Framework for the 1988 National Assessment of Educational Progress* (NAEP) (Branson, 1999 dalam Komalasari, 2011:50), komponen pengetahuan kewarganegaraan ini diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yaitu:

- 1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan?
- 2) Apa fondasi-fondasi sistem politik?
- 3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi menegakan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi?
- 4) Hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional?
- 5) Apa peran warga negara dalam demokrasi?

Sementara itu, dalam Kurikulum 2006 ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri

sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.

- 5) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
- 7) Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi, meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

b. Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)

Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic Skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. *The National Standards for Civics and Government dan The Civics Framework for 2006 National Assessment of Educa-*

tional Progress (NAEP) menegaskan bahwa keterampilan berpikir kritis meliputi keterampilan mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Sedangkan keterampilan partisipasi meliputi keterampilan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi.

Lebih lanjut, *Center for Civic Education (CEE)* (dalam Cholisin, 2011) merinci unsur-unsur komponen keterampilan kewarganegaraan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan keterampilan kewarganegaraan dalam praktik pembelajaran kewarganegaraan sebagai berikut:

- 1) Unsur keterampilan intelektual kewarganegaraan, meliputi:
 - a) Mengidentifikasi (menandai/menunjukkan) dibedakan menjadi keterampilan:
 - (1) Membedakan
 - (2) Mengkelompokkan/mengklasifikasikan
 - (3) Menentukan bahwa sesuatu itu asli.
 - b) Menggambarkan (memberikan uraian/ilustrasi), misalnya tentang: proses, lembaga, fungsi, alat, tujuan, kualitas
 - c) Menjelaskan (mengklarifikasi/menafsirkan), misalnya tentang:
 - (1) Sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa
 - (2) Makna dan pentingnya peristiwa atau ide
 - (3) Alasan bertindak
 - d) Menganalisis, misalnya tentang kemampuan menguraikan:
 - (1) Unsur-unsur atau komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi-institusi
 - (2) Konsekuensi dari ide, proses politik, institusi-institusi
 - (3) Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dan pendapat, mana yang merupakan tanggungjawab pribadi dan mana yang merupakan tanggungjawab publik.
 - e) Mengevaluasi pendapat/posisi: menggunakan kriteria/standar untuk membuat keputusan tentang:
 - (1) kekuatan dan kelemahan issue / pendapat
 - (2) menciptakan pendapat baru.
 - f) Mengambil pendapat/posisi:
 - (1) dari hasil seleksi berbagai posisi
 - (2) membuat pilihan baru
 - g) Mempertahankan pendapat/posisi:
 - (1) Mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang
 - (2) dipertahankan/diambil/dibela
 - (3) merespons posisi yang tidak disepakati.
- 2) Unsur keterampilan partisipasi kewarganegaraan, meliputi:
- a) Berinteraksi (termasuk berkomunikasi tentunya) terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, yang termasuk dalam keterampilan ini, antar lain :
 - (1) Bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun
 - (a) Menjelaskan artikulasi kepentingan
 - (b) Membangun koalisi, negoisasi, kompromi
 - (c) Mengelola konflik secara damai
 - (d) Mencari konsensus.
 - (2) Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik, yang termasuk keterampilan ini antar lain :
 - (a) Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV, dll untuk mengetahui persoalan-persoalan publik
 - (b) Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelompok kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti: pertemuan

organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

(3) Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal, yang termasuk keterampilan ini antara lain:

- (a) Melakukan simulasi tentang kegiatan: kampanye, pemilu, dengar pendapat di DPR/DPRD, pertemuan wali kota, lobby, peradilan
- (b) Memberikan suara dalam suatu pemilihan
- (c) Membuat petisi
- (d) Melakukan pembicaraan / memberi kesaksian di hadapan lembaga publik
- (e) Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain
- (f) Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.

Pentingnya keterampilan partisipasi dalam demokrasi telah digambarkan oleh Aristoteles dalam bukunya *Politics* (340) (Branson, dkk., 1999 dalam Cholisin, 2005). Aristoteles menyatakan, “Jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagian pendapat orang dapat diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan”. Dengan kata lain cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya.

Dimensi *civic skills* ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan

dan berprestasi unggul dari siswa, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran serta aktif warga negara. Untuk dapat berperan secara aktif tersebut diperlukan pengetahuan tentang konsep fundamental, sejarah, isu dan peristiwa aktual, dan fakta yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kontekstual, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan watak dari warga negara (Quigley dkk. dalam Komalasari, 2011:50).

c. Watak- Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)

Quigley, Buchanan dkk (1991, dalam Komalasari, 2011:50-51) merumuskan *civic disposition* adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Secara konseptual *civic disposition* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni: “*Civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self discipline, civic mindedness, open mindedness (openness, scepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles*” (Quigley, Buchanan dan Bahmueller, 1991 dalam Komalasari, 2011:50-51). Artinya kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggungjawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenal terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Branson (1992:23) menegaskan bahwa *civic disposition* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana

kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.

3. Kehidupan Demokrasi

Dari sudut bahasa (*etimologis*), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, *demos-cratein* atau *demos-cratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat (Winarno, 2012:90).

Dari sudut terminologi banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda (Winarno, 2012:91). Berikut beberapa definisi tentang demokrasi yang dikemukakan para ahli:

- a. Menurut Haris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah.
- b. Menurut Henry B. Mayo, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik.

- c. Menurut *International Commission for Jurist*, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.
- d. Menurut C.F. Strong, suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
- e. Menurut Samuel Huntington, sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Ada satu pengertian yang paling populer mengenai demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*) (Winarno, 2012:92).

Demokrasi sebenarnya tidak hanya dapat dipahami sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan saja, akan tetapi lebih daripada itu terdapat sejumlah nilai positif untuk mendukung terciptanya masyarakat yang aman, tenteram, adil dan sejahtera. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara filosofis demokrasi mengedepankan suara rakyat dalam menentukan setiap kebijakan negara. Berdasarkan pada filsafat demokrasi, maka segala aspek kehidupan amat bergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak rakyat bukan kehendak

individu yang bertindak sebagai penguasa.

Pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak selamanya berjalan mulus dan tanpa cela, dalam arti bahwa selalu ada kelemahan yang melekat pada sebuah sistem yang diciptakan dan diterapkan. Akan tetapi, terlepas dari itu semua seyogyanya kita harus pandai memilah dan membandingkan kebermampuan serta kebuntuan dari suatu sistem yang diterapkan termasuk demokrasi. Karena itu, dibutuhkan suatu pemaknaan yang mendalam mengenai apa, mengapa, kapan dan bagaimana menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan.

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi bukanlah sesuatu yang *taken for granted*, karena itu demokrasi membutuhkan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya yaitu budaya demokrasi yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu *mind set* (kerangka pikir) dan *setting social* (rancangan masyarakat). Bentuk kongkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat (masyarakat) maupun oleh pemerintah.

Winataputra, sebagaimana dikutip Andriati (2010:13) mengemukakan secara konseptual warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab memiliki ciri kualitatif dan indikator perilaku. Secara konseptual warga negara yang demokratis antara lain memiliki ciri-ciri umum atau ciri generik skor yang diperoleh dari kuesioner yang meliputi:

- a. *Pro bono publico*, yaitu sikap mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- b. *Pro patria primus patrialis*, yaitu sikap mengutamakan kepentingan Negara atau kepentingan umum dan rela berkorban untuk Negara atau kepentingan umum.

- c. Toleran atau menghormati dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda.
- d. Terbuka menerima pendapat orang lain.
- e. Tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar.
- f. Bersikap kritis terhadap pendapat orang lain
- g. Cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- h. Menghormati hak orang lain.
- i. Menghormati kekuasaan yang sah.
- j. Bersikap adil dan tidak diskriminatif
- k. Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab.

Nilai-nilai kehidupan demokrasi yang dapat dikembangkan di sekolah (Nurtjahyo, dalam Indraningsih dan Sri Poedjiastoeti, 2011:180) antara lain:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan suka rela. Siswa secara aktif dan suka rela dibiasakan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan meminimalisir adanya pihak yang dirugikan
- b. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, baik kekerasan psikis maupun fisik. Kekerasan hanya akan memperuncingkan permasalahan dan dalam hal ini, keteladanan dari seluruh komponen masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan sikap anti-kekerasan. Sekolah sebagai miniatur negara menjadi sangat rentan terhadap kejadian kejadian kekerasan di dalam negara.
- c. Menghargai keanekaragaman (pluralitas). Berdasarkan pengalaman bahwa manusia itu unik, sikap menghargai keunikan orang lain menjadi dasar bagi kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan keadilan dalam memajukan ilmu pengetahuan atau menuntut ilmu. Aktivitas di sekolah adalah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan hal ini sekaligus memberikan hak kepada siswa untuk menuntut ilmu dalam suasana yang bebas dari tekanan, kekerasan, dan diskriminasi.

- e. Memberikan hak dan tanggungjawab yang memadai bagi semua pihak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam pendidikan. Demikian pula di dalam kehidupan demokrasi di sekolah yang juga menuntut tanggungjawab yang sama dalam kemajuan pendidikan.

Pendidikan demokrasi dan belajar demokrasi di sekolah tidak dapat terlepas dari konsensus dasar Pembangunan Nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini bertujuan menghargai perbedaan dan keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang “adil dalam kemakmuran” dan “makmur dalam keadilan” dengan dasar Negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut jenis pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan teknik survey. Metode deskriptif analitis dalam penelitian ini dioperasionalkan dengan menggunakan statistik inferensial yaitu untuk menganalisis data sample dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensikan) untuk populasi dimana sample diambil (Sugiono, 2006: 14).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal Tahun Ajaran 2013 / 2014 yang berjumlah 186 siswa yang terdiri dari 6 kelas. Sampel penelitian sebanyak 70 siswa diambil menggunakan teknik *random sampling*.

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pengetahuan kewarganegaraan (X_1), kecakapan kewarganegaraan (X_2) dan watak-watak kewarganegaraan (X_3). Adapun yang menjadi variabel dependen

(Y) dalam penelitian ini adalah kehidupan demokrasi siswa.

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan dokumen-dokumen penting yang masih berkaitan untuk menunjang kelengkapan penelitian ini. Untuk mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan yang diinginkan peneliti, maka digunakan metode angket dan dokumentasi.

Dalam analisis data digunakan metode statistik, yang merupakan serangkaian metode yang dipakai untuk mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dan memberi makna data. Analisa data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi (R Square) dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 22 *For Windows Release*.

HASIL PENELITIAN

1. Deskriptif Data

Deskripsi hasil penelitian ini merupakan gambaran mengenai kondisi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan dan kehidupan demokrasi siswa.

a. Deskriptif Data Variabel X

Variabel X dalam penelitian ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan terdiri dari tiga sub variabel yaitu Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) (X_1), Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*) (X_2), dan Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) (X_3). Uraian mengenai gambaran masing-masing sub variabel tersebut di atas sebagai berikut:

1) Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*/ X_1)

Hasil pengolahan data penelitian tentang kondisi pengetahuan kewarganegaraan siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal diperoleh skor maksimal sebesar 14 dan skor minimal sebesar 10. Diperoleh rata-rata sebesar 11,83, dengan standar deviasi sebesar 1,215. Distribusi frekuensi data variabel Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*/ X_1)

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Data Variabel Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge/X₁*)

Skor	Kategori	f	%
10	Sedang/Cukup	10	14,3
11	Tinggi	21	30,0
12	Tinggi	17	24,3
13	Tinggi	15	21,4
14	Tinggi	7	10
Total		70	100

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 10 (14,3%) siswa SMP Negeri 1 Bungkal memiliki Pengetahuan Kewarganegaraan dalam kategori sedang/cukup dan 60 (85,7%) siswa memiliki Pengetahuan Kewarganegaraan dalam kategori tinggi.

Dengan memperhatikan Tabel 4.3 di atas berkaitan dengan sebaran frekuensi skor variabel Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) para responden dapat diklasifikasikan 21 (30%) pada kelompok rata-rata, 39 (55,7%) pada kelompok di atas rata-rata,

dan 10 (14,3%) pada kelompok di bawah rata-rata.

2) Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills/X₂*)

Hasil pengolahan data penelitian tentang kondisi keterampilan kewarganegaraan siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal diperoleh skor maksimal sebesar 44 dan skor minimal sebesar 38. Diperoleh rata-rata sebesar 41,73, dengan standar deviasi sebesar 1,424. Distribusi frekuensi data variabel Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill/X₂*) selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Data Variabel Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill/X₂*)

Skor	Kategori	f	%
38	Tinggi	2	2,9
39	Tinggi	5	7,1
40	Tinggi	4	5,7
41	Tinggi	14	20
42	Tinggi	25	35,7
43	Tinggi	14	20
44	Tinggi	6	8,6
Total		70	100

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa seluruh siswa SMP Negeri 1 Bungkal memiliki Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*) dalam kategori tinggi.

Dengan memperhatikan Tabel 4.4 di atas berkaitan dengan sebaran frekuensi skor variabel Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*) para responden dapat diklasifikasikan 25 (35,7%) pada kelompok rata-rata, 20 (28,6%) pada kelompok di atas rata-rata,

dan 25 (35,7%) pada kelompok di bawah rata-rata

3) Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) (*X₃*)

Hasil pengolahan data penelitian tentang kondisi Watak-watak Kewarganegaraan siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal diperoleh skor maksimal sebesar 36 dan skor minimal sebesar 30. Diperoleh rata-rata sebesar 33,64, dengan standar deviasi sebesar 1,533. Distribusi frekuensi data variabel Watak-watak

Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) (X_3) selengkapnya dapat dilihat pada

tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Data Variabel Watak-watak Kewarga-negaraan (*Civic Disposition*) (X_3)

Skor	Kategori	f	%
30	Tinggi	3	4,3
31	Tinggi	5	7,1
32	Tinggi	7	10
33	Tinggi	11	15,7
34	Tinggi	23	32,9
35	Tinggi	15	21,4
36	Tinggi	6	8,6
Total		70	100

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa seluruh siswa SMP Negeri 1 Bungkal memiliki Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) dalam kategori tinggi.

Dengan memperhatikan Tabel 4.5 di atas berkaitan dengan sebaran frekuensi skor variabel Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) para responden dapat diklasifikasikan 23 (32,9%) pada kelompok rata-rata, 21 (30%) pada kelompok di atas rata-rata,

dan 26 (37,1%) pada kelompok di bawah rata-rata.

b. Deskriptif Data Variabel Y (Kehidupan Demokrasi)

Hasil pengolahan data penelitian tentang kondisi Kehidupan Demokrasi Siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal diperoleh skor maksimal sebesar 47 dan skor minimal sebesar 42. Diperoleh rata-rata sebesar 44,84, dengan standar deviasi sebesar 1,347. Distribusi frekuensi data variabel Kehidupan Demokrasi Siswa (Y) selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Data Variabel Kehidupan Demokrasi Siswa (Y)

Skor	Kategori	f	%
42	Tinggi	3	4,3
43	Tinggi	10	14,3
44	Tinggi	13	18,6
45	Tinggi	21	30
46	Tinggi	15	21,4
47	Tinggi	8	11,4
Total		70	100

Sumber: Data Primer diolah, 201

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa Kehidupan Demokrasi siswa SMP Negeri 1 Bungkal dalam kategori tinggi. Dengan memperhatikan Tabel 4.6 di atas berkaitan dengan sebaran frekuensi skor variabel Kehidupan Demokrasi Siswa para responden dapat diklasifikasikan 21 (30%) pada kelompok rata-rata, 23 (32,8%) pada kelompok di atas rata-rata, dan 26 (37,1%) pada kelompok di bawah rata-rata.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS Statistics 22 For Windows Release.

Hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Analisis Regresi

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	21.484	4.842		4.437	.000		
	Civic Knowledge	.300	.120	.271	2.511	.015	.891	1.123
	Civic Skill	.269	.097	.285	2.782	.007	.989	1.011
	Civis Disposition	.255	.095	.290	2.687	.009	.892	1.121

a. Dependent Variable: Kehidupan Demokrasi

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Dari tabel di atas diperoleh suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 21,484 + 0,300 X_1 + 0,269 X_2 + 0,255 X_3$$

Persamaan regresi tersebut memberikan gambaran sebagai berikut:

- $a = 21,484$, artinya, jika Pengetahuan Kewarganegaraan (X_1), Keterampilan Kewarganegaraan (X_2), dan Watak-watak Kewarganegaraan (X_3) sama dengan nol, maka nilai Kehidupan Demokrasi Siswa sebesar 21,484 poin.
- $b_1 = 0,300$, Koefisien Regresi Pengetahuan Kewarganegaraan (X_1) Sebesar 0,300, artinya setiap terjadi kenaikan 1 nilai Pengetahuan Kewarganegaraan (X_1), maka akan menaikkan Kehidupan Demokrasi Siswa (Y) sebesar 0,300 poin. Dengan asumsi Keterampilan Kewarganegaraan (X_2), dan Watak-watak Kewarganegaraan (X_3) konstan.
- $b_1 = 0,269$, Koefisien Regresi Keterampilan Kewarganegaraan (X_2) sebesar 0,269, artinya setiap terjadi kenaikan 1 nilai Keterampilan Kewarganegaraan (X_2), maka akan menaikkan Kehidupan Demokrasi Siswa (Y) sebesar 0,269 poin. Dengan asumsi Pengetahuan Kewarganegaraan (X_1), dan Watak-watak Kewarganegaraan (X_3) konstan.
- $b_1 = 0,255$, Koefisien Regresi Watak-watak Kewarganegaraan (X_3) sebesar 0,255, artinya setiap terjadi kenaikan 1 nilai Watak-watak Kewarganega-

raan (X_3), maka akan menaikkan Kehidupan Demokrasi Siswa (Y) sebesar 0,255 poin. Dengan asumsi Pengetahuan Kewarganegaraan (X_1), dan Keterampilan Kewarganegaraan (X_2) konstan.

3. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji hipotesis secara parsial (Uji T) digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing (secara parsial) variabel independen (*Civic Knowledge* (X_1), *Civic Skills* (X_2), *Civic Disposition* (X_3)) terhadap variabel dependen (Kehidupan Demokrasi (Y)). Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.

a. Variabel Pengetahuan Kewarganegaraan/*Civic Knowledge* (X_1)

Pengujian hipotesis T pada variabel Pengetahuan Kewarganegaraan / *Civic Knowledge* (X_1) diartikan sebagai pengujian signifikan-tidaknya pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan Pengetahuan Kewarganegaraan/*Civic Knowledge* terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa. Rumusan Hipotesis yang diajukan yaitu:
 $H_0 : b_1 = 0$: Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa

$H_a : b_1 \neq 0$: Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) berpengaruh signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa

Dari hasil pengujian SPSS diperoleh untuk Pengetahuan Kewarganegaraan/*Civic Knowledge* (X_1) diperoleh $T_{hitung} = 2,511$ dengan tingkat signifikan 0,015. Sedangkan nilai T_{tabel} dengan $\alpha = 5\% / 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi, signifikansi 0,025) dan *Degree of Freedom* (df) = $n - k - 1 = 70 - 3 - 1 = 66$, sebesar 1,996 (lihat lampiran). Dengan demikian $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,511 > 1,996$). Dari hasil tersebut keputusan yang dapat diambil yaitu menerima H_a dan menolak H_0 , maka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan Pengetahuan Kewarganegaraan/*Civic Knowledge* berpengaruh signifikan terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa.

b. Variabel Keterampilan Kewarganegaraan/*Civic Skill* (X_2)

Pengujian hipotesis T pada variabel Keterampilan Kewarganegaraan/*Civic Skill* (X_2) diartikan sebagai pengujian signifikan-tidaknya pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan Keterampilan Kewarganegaraan/*Civic Skill* terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa. Rumusan Hipotesis yang diajukan yaitu:

$H_0 : b_2 = 0$: Keterampilan Kewarganegaraan / *Civic Skill* tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa

$H_a : b_2 \neq 0$: Keterampilan Kewarganegaraan / *Civic Skill* berpengaruh signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa

Dari hasil pengujian SPSS diperoleh untuk Keterampilan Kewarganegaraan/*Civic Skill* (X_2) diperoleh $T_{hitung} = 2,782$ dengan tingkat signifikan 0,007. Sedangkan nilai T_{tabel} dengan $\alpha = 5\% / 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi, signifikansi 0,025) dan *Degree of Freedom* (df) = $n - k - 1 = 70 - 3 - 1 = 66$, sebesar 1,996 (lihat lampiran). Dengan demikian $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,782 >$

1,996). Dari hasil tersebut keputusan yang dapat diambil yaitu menerima H_a dan menolak H_0 , maka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan Keterampilan Kewarganegaraan/*Civic Skill* berpengaruh signifikan terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa.

c. Variabel Watak-watak Kewarganegaraan/*Civic Disposition* (X_3)

Pengujian hipotesis T pada variabel Watak-watak Kewarganegaraan/*Civic Disposition* (X_3) diartikan sebagai pengujian signifikan-tidaknya pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan Watak-watak Kewarganegaraan/*Civic Disposition* (X_3) terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa. Rumusan Hipotesis yang diajukan yaitu:

$H_0 : b_3 = 0$: Watak-watak Kewarganegaraan/*Civic Disposition* tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa

$H_a : b_3 \neq 0$: Watak-watak Kewarganegaraan/*Civic Disposition* berpengaruh signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa

Dari hasil pengujian SPSS diperoleh untuk Watak-watak Kewarganegaraan/*Civic Disposition* (X_3) diperoleh $T_{hitung} = 2,687$ dengan tingkat signifikan 0,009. Sedangkan nilai T_{tabel} dengan $\alpha = 5\% / 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi, signifikansi 0,025) dan *Degree of Freedom* (df) = $n - k - 1 = 70 - 3 - 1 = 66$, sebesar 1,996 (lihat lampiran). Dengan demikian $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,687 > 1,996$). Dari hasil tersebut keputusan yang dapat diambil yaitu menerima H_a dan menolak H_0 , maka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan Watak-watak Kewarganegaraan/*Civic Disposition* berpengaruh signifikan terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa.

4. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji Hipotesis secara serempak (Uji F) digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen (*Civic knowledge* (X_1), *Civic Skills* (X_2), *Civic Disposition* (X_3)) secara bersama-sama

terhadap variabel dependen (Kehidupan Demokrasi Siswa (Y)). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*), dan Watak-watak kewarganegaraan *Civic Disposition* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa.

- $H_a : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*), dan Watak-watak Kewarganegaraan *Civic Disposition* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa.

Hasil pengujian hipotesis simultan (Uji F) dengan program IBM SPSS Statistics 22 For Windows Release dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Pengujian Koefisien Regresi dengan Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	39.630	3	13.210	10.180	.000 ^b
	Residual	85.641	66	1.298		
	Total	125.271	69			

a. Dependent Variable: Kehidupan Demokrasi

b. Predictors: (Constant), Civic Disposition, Civic Skill, Civic Knowledge

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS terlihat pada Tabel 6 diperoleh besarnya F_{hitung} adalah 10,180. Sedangkan nilai F_{tabel} pada $\alpha = 5\%$ (signifikansi 0,05) dengan *Degree of Freedom* (df) = $n-k-1 = 70-3-1 = 66$ adalah 2,74 (lihat lampiran). Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,180 > 2,74$). Dari hasil tersebut keputusan yang dapat diambil yaitu menerima H_a dan menolak H_0 , maka Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*), dan Watak-watak Kewarganegaraan *Civic Disposition* secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa.

5. Koefisien Determinasi (R Square)

Uji R Square atau koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (*Civic Knowledge* (X_1), *Civic Skills* (X_2), dan *Civic Disposition* (X_3)) secara serentak terhadap variabel dependen (kehidupan demokrasi (Y)). Hasil pengujian dengan program IBM SPSS Statistics 22 For Windows Release untuk Koefisien Determinasi (R Square) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Pengujian Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562 ^a	.316	.285	1.139

a. Predictors: (Constant), Civic Disposition, Civic Skill, Civic Knowledge

b. Dependent Variable: Kehidupan Demokrasi

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Hasil perhitungan dengan program IBM SPSS Statistics 22 For Windows Release untuk Koefisien Determinasi (R Square) sebagaimana Tabel 7

dapat diketahui bahwa Koefisien Determinasi (R Square/ R^2) yang diperoleh sebesar 0,316. Hal ini berarti 31,6% Kehidupan Demokrasi Siswa dapat dije-

laskan oleh variabel Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*), dan Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*), sedangkan sisanya 68,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

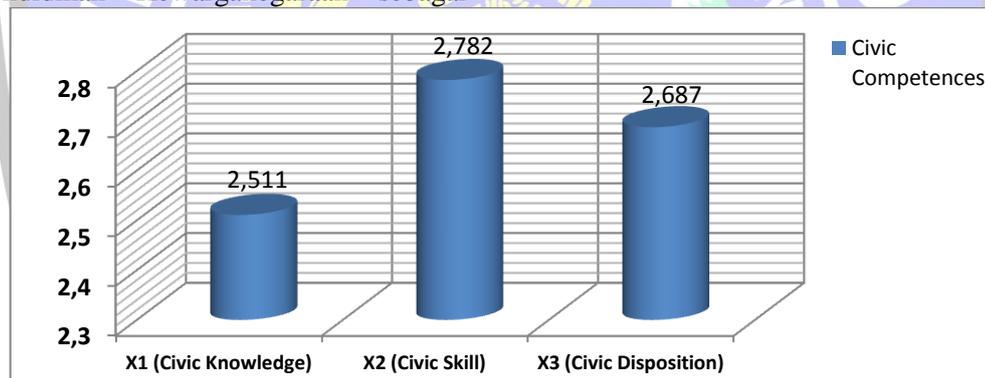
PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya akan dibahas ke dalam beberapa pointer penting sebagai berikut:

1. Pengaruh Masing-masing Komponen Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) Terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa Ber-variabel.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, masing-masing komponen Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan (*Civic Competences*) memiliki besaran pengaruh yang bervariasi terhadap kehidupan demokrasi siswa. Dilihat dari besaran koefisien korelasi secara parsial, maka keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) memiliki koefisien korelasi paling besar yaitu 2,782, watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*) 2,687 dan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) 2,511. Dengan demikian semua komponen Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan (*Civic Competences*) memiliki pengaruh positif kuat terhadap kehidupan demokrasi. Perbandingan besaran koefisien korelasi masing-masing komponen Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan (*Civic Competences*) dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Gambar 1 Besaran Koefisien Korelasi Komponen Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) Secara Parsial Terhadap Kehidupan Demokrasi

Simpulan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis dalam uraian berikut.

a. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*) Memiliki Kontribusi Terpenting Terhadap Kehidupan Demokrasi.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian diketahui Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*) memiliki pengaruh positif kuat yang signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa. Diperoleh harga koefisien regresi sebesar 2,782 dengan signifikansi sebesar 0,007

< 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*) secara parsial berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi siswa. Dengan demikian, Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*) memberikan sumbangsih efektif terhadap kehidupan demokrasi siswa dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi keterampilan kewarganegaraan siswa semakin baik pula kehidupan demokrasi siswa dan demikian juga sebaliknya. Semakin turun tingkat keterampilan kewarganegaraan

siswa semakin buruk pula kehidupan demokrasi siswa.

Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic Skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. meliputi keterampilan mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Sedangkan keterampilan partisipasi meliputi keterampilan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi. Dalam konteks kehidupan demokrasi, pentingnya komponen keterampilan kewarganegaraan yaitu untuk membekali peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang demokratis dengan menguasai sejumlah kemampuan, antara lain:

- 1) Mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inkuiri.
- 2) Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu.
- 3) Menentukan atau mengambil sikap guna mencapai suatu posisi tertentu.
- 4) Membela atau mempertahankan posisi dengan mengemukakan argumen yang kritis, logis, dan rasional.
- 5) Memaparkan suatu informasi yang penting kepada khalayak umum.
- 6) Membangun koalisi, kompromi, negosiasi, dan konsensus.

Kebiasaan berfikir kritis dan berpartisipasi terhadap masalah-masalah publik akan mendorong siswa atau warga negara senantiasa peka terhadap persoalan-persoalan publik dan peduli terhadap keberlangsungan demokrasi dan tegaknya demokrasi hingga pada akhir-

nya cita-cita demokrasi dapat terwujud. Hasil penelitian ini semakin memperkuat dimensi *Civic Skills* yaitu keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatoris yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menegakkan dan mewujudkan kehidupan yang demokratis di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) Memiliki Kontribusi Terhadap Kehidupan Demokrasi.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian diketahui Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) memiliki pengaruh positif kuat yang signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa. Diperoleh harga koefisien regresi sebesar 2,687 dengan signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) secara parsial berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi siswa. Dengan demikian, Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) memberikan sumbangsih efektif terhadap kehidupan demokrasi siswa dan dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat watak-watak kewarganegaraan siswa semakin baik pula kehidupan demokrasi siswa dan demikian juga sebaliknya. Semakin turun watak-watak kewarganegaraan siswa semakin buruk pula kehidupan demokrasi siswa.

Civic Disposition adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Branson (1992:23) menegaskan bahwa civic disposition mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat seperti tanggungjawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara,

kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.

Pentingnya komponen karakter kewarganegaraan yaitu untuk membekali peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang demokratis dengan menguasai sejumlah karakter, antara lain:

- 1) Memberdayakan dirinya sebagai warganegara yang independen, aktif, kritis, dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktifitas masyarakat, politik dan pemerintahan pada semua tingkatan (daerah dan nasional).
- 2) Memahami bagaimana warganegara melaksanakan peranan, hak, dan tanggungjawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan nasional).
- 3) Memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia, dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4) Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi watak-watak kewarganegaraan dalam kehidupan demokrasi siswa yaitu akan membawa siswa lebih cerdas dalam bertindak berdasarkan nilai, norma dan segala bentuk peraturan yang berlaku dan mendorong timbulnya kebiasaan siswa untuk berfikir dan berperilaku positif serta kesadaran dalam diri siswa akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu akan menghindarkan diri siswa dari perilaku-perilaku yang meyimpang karena pada hakikatnya demokrasi adalah memuat nilai-nilai, norma-norma yang menjadi suatu keharusan untuk ditegakkan dan dijunjung tinggi.

c. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) Memiliki Kontribusi Terhadap Kehidupan Demokrasi.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian diketahui Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) memiliki pengaruh positif kuat yang signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa. Diperoleh harga koefisien regresi sebesar 2,687 dengan signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) secara parsial berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi siswa. Dengan demikian, Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) memberikan sumbangsih efektif terhadap kehidupan demokrasi siswa dan dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat Pengetahuan Kewarganegaraan siswa semakin baik pula kehidupan demokrasi siswa dan demikian juga sebaliknya. Semakin turun Pengetahuan Kewarganegaraan siswa semakin buruk pula kehidupan demokrasi siswa.

Civic Knowledge adalah materi substansi atau pengetahuan yang berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Pentingnya komponen pengetahuan kewarganegaraan yaitu untuk membekali peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang demokratis dengan menguasai sejumlah pengetahuan, antara lain :

- 1) Memahami tujuan pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar konstitusi pemerintahan Republik Indonesia.
- 2) Mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintahan daerah dan nasional serta bagaimana keterlibatan warganegara membentuk kebijaksanaan publik.
- 3) Mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negaranegara dan bangsa lain serta masalah-masalah dunia dan/atau internasional.

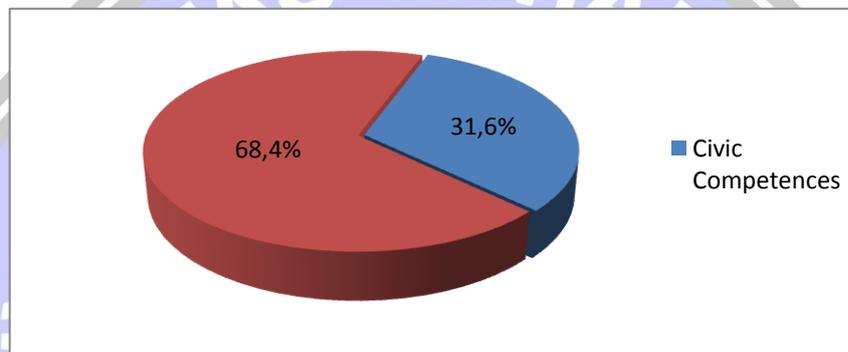
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengetahuan kewarganegaraan dalam kehidupan demokrasi untuk menjadikan siswa semakin cerdas dengan berlandaskan pengetahuan dan

pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik, pemerintahan dan demokrasi sehingga pada akhirnya dengan berbekal pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki, siswa mampu untuk berperan aktif dalam pembangunan dan mendukung tegaknya demokrasi.

2. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) Berpengaruh Signifikan Terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan (*Civic Com-*

petences) memiliki korelasi positif kuat dengan kehidupan demokrasi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal, yaitu sebesar 10,180. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan (*Civic Competences*) berpengaruh sebesar 31,6% terhadap kehidupan demokrasi siswa, selebihnya yaitu 68,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Berikut ini gambaran besaran kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan (*Civic Competences*) terhadap kehidupan demokrasi siswa SMP.



Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Gambar 2 Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) Terhadap Kehidupan Demokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen kompetensi kewarganegaraan (*Civic Competences*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*) secara bersama-sama memberikan sumbangsih efektif terhadap kehidupan demokrasi siswa dan dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat kompetensi kewarganegaraan siswa semakin baik kehidupan demokrasi siswa dan demikian juga sebaliknya, semakin menurun kompetensi kewarganegaraan siswa semakin buruk pula kehidupan demokrasi siswa.

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dikuasai seorang peserta didik yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mendukungnya menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana ditegaskan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, kompetensi adalah kemampuan bersikap, berfikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu kompetensi kewarganegaraan berpengaruh terhadap partisipasi politik siswa (Hilham, 2010) dan semakin memperkuat fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan sebagai sebagai wahana

pengembangan kompetensi dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih demokratis di semua aspek kehidupan dan semakin mempertegas bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal Pendidikan Kewarganegaraan merupakan satu-satunya sarana mentransformasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi kepada peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kompetensi kewarganegaraan memiliki pengaruh yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan faktor lain yang juga turut berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi siswa. Hal tersebut sebagai isyarat bahwa pendidikan kewarganegaraan masih perlu untuk terus dikaji lebih lanjut dan dikembangkan sehingga semakin memperkuat peran dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan.

3. Terdapat Komponen Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) Yang Dominan Berpengaruh Terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa.

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan kewarganegaraan memiliki koefisien regresi tertinggi, kemudian disusul watak-watak kewarganegaraan dan pengetahuan kewarganegaraan (lihat gambar 1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan kewarganegaraan memiliki pengaruh yang dominan terhadap kehidupan demokrasi siswa. Hal tersebut dapat dikaji dari dimensi keterampilan kewarganegaraan. *Intellectual Skill* menjadikan siswa lebih kritis terhadap persoalan-persoalan yang terdapat di lingkungan sekitar dan *Participation Skill* menjadikan siswa lebih peduli dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang ter-

dapat dilingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan kecenderungan siswa dalam kesehariannya kritis terhadap segala permasalahan sekitar siswa dan terdapat kecenderungan siswa lebih aktif dalam berpartisipasi. Sejalan dengan konsep bahwa demokrasi membutuhkan peran aktif warga negara agar keberadaannya bisa terus eksis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) yang meliputi Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*), dan Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal Tahun Pelajaran 2013/2014, artinya dari masing-masing komponen kompetensi kewarganegaraan yang dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap kehidupan demokrasi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) yang meliputi Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*), dan Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kehidupan demokrasi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal Tahun Pelajaran 2013/2014, artinya secara bersama-sama komponen kompetensi kewarganegaraan yang dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kontribusi terhadap kehidupan demo-

krasi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal Tahun Pelajaran 2013/2014.

3. Diantara ketiga komponen kompetensi kewarganegaraan yang dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, komponen Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*) memberikan kontribusi terbesar disusul Watak-watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) dan Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*).

SARAN

Berkaitan dengan temuan di lapangan, penulis mengajukan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana kompetensi kewarganegaraan (*Civic Competences*) siswa kelas IX SMP Negeri 1 Bungkal Tahun Pelajaran 2013/2014 menjadi acuan bagi sekolah, bagi guru dan bagi siswa untuk terus berupaya meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa. Sesuai hasil analisis yang menunjukkan bahwa Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*) merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi siswa, maka perlu untuk lebih ditingkatkan lagi.
2. Komponen kompetensi kewarganegaraan yang tidak dominan juga perlu menjadi perhatian. Sekolah dan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya memperhatikan indikator-indikator watak-watak kewarganegaraan dan pengetahuan kewarganegaraan siswa yang perlu dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan serta berupaya lebih kreatif dan inovatif dalam mentransformasikan indikator-indikator watak-watak kewarganegaraan dan pengetahuan kewarganegaraan kepada peserta didik.
3. Dengan adanya faktor eksternal yang turut mempengaruhi kehidupan demokrasi siswa, maka dibutuhkan peran aktif seluruh komponen baik keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi siswa.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya dapat menentukan langkah yang tepat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia siswa sebagai peserta didik dan sebagai generasi penerus bangsa dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan karakter/watak kewarganegaraan yang lebih mantap sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia lebih tegak dan beradab. Bagi akademisi hendaknya lebih giat dalam melakukan penelitian-penelitian untuk mengembangkan khasanah keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai penopang tegaknya demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriati, Lisa. 2010. *Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembinaan Siswa Sebagai Warganegara Yang Demokratis (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Siswa SMA di Kota Baturaja)*. Tesis Tidak Diterbitkan. Bandung: Program Pascasarjana UPI Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kerjasama Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation.
- Branson, Margaret S., dkk. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: Kerjasama LKIS dan The Asia Foundation.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, Dasim & Winataputra, Udin S. 2007. *Civic Education Konteks, Landasan Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI.
- Cholisin. 2011. *Peran Guru PKn dalam Pendidikan Karakter*. Disampaikan pada Kuliah Umum Jurusan PPKn FKIP UAD Yogyakarta, 5 Februari 2011.
- Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Komalasari, Kokom. 2011. Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Peserta Didik SMP di Jabar. *Mimbar*, Vol. XXVII, No. 1, Juni 2011.
- Kurniadi, Hilham. 2010. *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan (Civic Competences) Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Siswa: Studi Analisis Deskriptif Pada Siswa SMA Se Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung*. Tesis Tidak Diterbitkan. Bandung: Program Pascasarjana UPI Bandung.
- Prasetyo, Galang Eko. 2012. Pengaruh Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Demokrasi Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Yogyakarta Tahun Ajaran 2010/2011. *Jurnal Citizenship*, Vol. 1, No. 2, Januari 2012, hal. 105.
- Qualifications and Curriculum Authority/QCA. 1998. *Education for Citizenship and The Teaching of Democracy in Schools*. London: Departemen of Education and Employment-DEE.
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Afabeta
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Afabeta
- Winarno. 2012. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Winataputra, Udin S. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi Tidak Diterbitkan. Bandung: Program Pascasarjana UPI Bandung.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Indraningsih dan Poedjiastoeti, Sri. 2011. Belajar Demokrasi Di Sekolah: Sebuah Kajian Filosofis. Online (<http://icssis.wordpress.com/prosiding/prosiding-icssis-2011>), diakses 18 Nopember 2013.

Santoso, Slamet. 2012. SPSS: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Dalam Analisis Regresi. Online (<http://ssantoso.umpo.ac.id/?p=166>), diakses 22 Nopember 2013.

